e-ISSN: 2550-0813 | p-ISSN: 2541-657X | Vol 12 No 7 Tahun 2025 Hal. : 3119-3126

NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial

available online http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index

ANALISIS MANAJEMEN LIKUIDITAS PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DI PROVINSI RIAU 2020–2024

Khairuddin Damanik, Nurnasrina, Nurul Huda, Nola Fibriyani Bte Salman

Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis Manajemen Likuiditas pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang berada di Provinsi Riau periode 2020 sampai 2024. Penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan studi kepustakaan. Data diperoleh dari Laporan Keuangan yang diambil dari website Otoritas Jasa Keuangan (OJK), artikel ilmiah, serta sumber-sumber terkait lainnya. Hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat dua BPRS yang masuk dalam standar rentang nilai FDR, yaitu PT. BPRS Siak Jaya ditahun 2023 sebesar 105% dan PT. BPRS Hasanah di tahun 2019 dan 2020 yaitu masing-masing sebesar 96,86% dan 84,9%. Namun dari ketiga BPRS di Provinsi Riau pada tahun 2024 yang paling mendekati rentang standar nilai FDR adalah PT. BPRS Siak Jaya sebesar 120%. Nilai cash ratio BPRS di Provinsi Riau juga menunjukkan tingkat likuiditas yang cukup rendah, karena rasio tertinggi dari BPRS yang ada, hanya setengah kas yang tersedia untuk membayar 1 utang atau 50,23% ditahun 2021. Hal ini menunjukkan BPRS di Provinsi Riau masih belum optimal dalam manajemen likuiditasnya. Idealnya, semakin tinggi cash ratio, semakin baik kemampuan perusahaan dalam menghadapi kewajiban mendesak. Namun, terlalu tinggi juga bisa berarti perusahaan tidak memaksimalkan penggunaan dananya. Hal ini menuntut pengelolaan likuiditas yang sangat hati-hati, terutama dengan tetap menjaga prinsip syariah.

Kata Kunci: BPRS, Manajemen Likuiditas, FDR, Cash Ratio.

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 memberikan dampak signifikan bagi perkembangan ekonomi dunia seperti sektor riil, keuangan dan perbankan, termasuk bank syariah. Namun, kinerja perbankan syariah justru mampu bertahan, walau banyak dunia usaha lain yang terkena dampaknya pada saat pandemi covid-19 melanda dunia. Hal ini ditunjukkan dari

*Correspondence Address : khairdamanik@gmail.com
DOI : 10.31604/jips.v12i7.2025. 3119-3126
© 2025UM-Tapsel Press

kinerja bank syariah negara-negara OKI pada era digital di masa pandemi menunjukkan mampu bertahan (Sumadi,2020). Dengan kata lain kinerja bank syariah ini tidak terpengaruh pandemi Covid-19. Begitu juga dengan total aset dan pembiayaan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Provinsi Riau yang terus mengalami kenaikan, walau pandemi covid-19 melanda dunia. Hal ini bisa dilihat pada tabel.1 dibawah ini(Otoritas Jasa Keuangan,2024).

Tabel. 1. Jumlah Aset dan Pembiayaan BPRS Provinsi Riau 2019 – 2024 (dalam ribuan rupiah)

Tahun	Aset	Pembiayaan
2019	Rp. 52.212.000	Rp. 28.706.000
2020	Rp. 64.704.000	Rp. 35.724.000
2021	Rp. 85.541.000	Rp. 50.956.000
2022	Rp. 134.589.000	Rp. 84.948.000
2023	Rp. 166.269.000	Rp. 111.159.000
2024*	Rp. 159.123.000	Rp. 119.203.000

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan,2024 (data diolah)

Aset Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Provinsi Riau mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, kenaikan aset signifikan yaitu sebesar Rp.106.911.000.000 dari tahun 2019 sampai september 2024. Hal ini menandakan kinerja BPRS di Riau baik, begitu juga dengan jumlah pembiayaan yang mengalami kenaikan yang signifikan. Terdapat tiga BPRS di Provinsi Riau, yang masing-masing terletak di Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, dan Kota Pekanbaru. Dari 12 kabupaten kota di Provinsi Riau, baru 2 kabupaten dan satu kota yang terdapat Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel. 2. Daftar BPRS di Provinsi Riau Tahun 2024

No	Nama Bank	Kab/Kota
1	PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)	Kampar
2	PT. BPRS Siak Jaya	Siak
3	PT. BPRS Hasanah	Pekanbaru

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan,2024 (data diolah)

Dalam menjalankan usahanya, jumlah murabahah pada BPRS di Provinsi Riau juga terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, hal ini bisa dilihat pada tabel 3 berikut ini(Otoritas Jasa Keuangan,2024).

Tabel. 3. Jumlah Murabahah BPRS di Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Ribuan Rupiah)

Tahun	PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)	PT. BPRS Siak Jaya	PT. BPRS Hasanah
2019	4.220.667	-	1.649.426
2020	4.712.373	-	1.698.302
2021	5.670.168	-	2.797.991
2022	7.002.906	291.824	4.213.859
2023	7.939.296	1.525.080	4.782.287
2024*	6.114.801	973.317	3.195.892

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan,2024 (data diolah)

Kenaikan pada aset, pembiayaan, dan murabahah pada BPRS di Provinsi Riau merupakan tren yang sangat bagus. Namun, dari sisi kualitas pembiayaan, terlihat *NPF Netto* mengalami penurunan dari tahun ke tahun pada setiap BPRS yang ada di Provinsi Riau, *NPF netto* BPRS Siak Jaya mengalami penurunan dari 12,6% di tahun 2023 menjadi 7,48% pada tahun 2024. Begitu juga *NPF netto* pada BPRS Hasanah dan BPRS Berkah Dana Fadhillah, masing-masing *NPF netto* tahun 2022 sebesar 4,53% dan 3,27% menjadi 1,91% dan 0,73% di tahun 2023. Namun di tahun 2024, *NPF netto* pada BPRS Berkah Dana Fadhillah turun kembali menjadi 0,53%, sedangkan *NPF netto* pada BPRS Hasanah naik menjadi 4,53%. Hal ini mengindikasikan pada kualitas pembiayaan. Sementara itu, dari sisi likuiditas terlihat rasio *FDR* pada BPRS Berkah Dana Fadhilah di tahun 2024 sebesar 70.45%, sedangkan rasio FDR pada BPRS Siak Jaya dan BPRS Hasanah diatas 100% di tahun yang sama, masing-masing sebesar 120% dan 153.94%, menandakan potensi risiko likuiditas (Otoritas Jasa Keuangan,2025).

Selain tren tentang kenaikan aset, pembiayaan, dan murabahah pada BPRS di Provinsi Riau. Perekonomian Riau pada triwulan IV 2024 juga tumbuh sebesar 3,52% *(yoy)*, lebih tinggi dari realisasi triwulan sebelumnya sebesar 3,46% *(yoy)*, namun belum mencapai target pertumbuhan ekonomi Riau. Inflasi Riau tahun 2024 sebesar 1,25% *(yoy)* tercatat lebih rendah dibandingkan tahun 2023 sebesar 2,50% *(yoy)*. Melandainya inflasi Riau tahun 2024 salah satunya didorong oleh sektor Jasa Keuangan(Bank Indonesia,2024). Hal ini menunjukkan bahwa sektor jasa keuangan termasuk BPRS menjadi salah satu pendorong bagi perekonomian Riau. BPRS tidak hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga berfungsi sebagai penggerak ekonomi lokal melalui pembiayaan UMKM. Namun, ketidakstabilan keuangan pada BPRS dapat menimbulkan efek domino terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di sektor informal.

Sejauh ini, sebagian besar penelitian terkait BPRS lebih banyak berfokus pada aspek profitabilitas atau pembiayaan berbasis syariah. Masih terbatasnya kajian yang secara spesifik membahas sinergi antara manajemen likuiditas dan gap sebagai faktor penentu kesehatan keuangan BPRS, khususnya dalam konteks regional seperti Provinsi Riau. Oleh karena itu, penulis tertarik membahas mengenai Manajemen Likuiditas pada BPRS yang berada di Provinsi Riau periode 2020 sampai 2024. Analisis terhadap efektivitas manajemen likuiditas menjadi penting guna memastikan kesinambungan operasional BPRS, memperkuat daya dukung ekonomi daerah, serta memberikan rekomendasi kebijakan berbasis data bagi otoritas terkait.

Manajemen likuiditas pada bank syariah merupakan upaya pengelolaan dana likuid bank yang mudah ditunaikan yang berfungsi untuk memenuhi kewajiban bank yang harus segera dibayar(Sulistyowati,2015). Manajemen likuiditas sangat diperlukan agar perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan baik, karena likuiditas juga merupakan salah satu faktor penentu sehatnya perbankan syariah dalam melunasi dana para deposannya yang ingin menarik kembali kredit, salah satunya dinilai dengan menggunakan rasio FDR *(Financing to Deposit Ratio)* (Muljono,1996). Selain *FDR* sebagai salah satu rasio yang mencerminkan kapasitas bank dalam mengelola likuiditasnya dan penilaian kesehatan suatu bank. *Cash Ratio* juga dapat digunakan untuk penilaian likuiditas suatu bank dengan mengukur besarnya uang kas yang tersedia untuk melunasi kewajiban jangka pendek yang ditunjukkan dari tersedianya dan kas atau setara kas. Jika hasil rasio menunjukan 1:1 atau 100% atau semakin besar perbandingan kas atau setara kas dengan utang akan semakin baik

Apabila manajemen likuiditas dalam sebuah bank dirancang dengan baik, efesien dan optimal, maka terjadi peningkatan terhadap nilai *Net Profit Margin* bank (Mahdatika dan Mashrafiyah,2021).

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Studi kepustakaan digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Data diperoleh dari Laporan Keuangan yang diambil dari website Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Laporan tahunan setiap BPRS periode 2019 sampai 2024. Dan juga diperoleh dari website Bank Indonesia, serta sumber-sumber terkait lainnya. Data ini digunakan untuk mencari besarnya nilain *FDR* dan *Cash Ratio* pada BPRS di Provinsi Riau, kemudian dianalisis, diinterpretasikan

dan dikaitkatkan dengan manajemen likuiditas serta kesehatan bank.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di tahun 2016, OJK mengeluarkan peraturan OJK yaitu nomor 3 POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sekarang, sebagaimana amanat UU P2SK serta sebagai penyelarasan dengan kebijakan terkini, terdapat perubahan nomenklatur dan definisi BPR Syariah. BPR Syariah menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Terdapat tiga BPRS di Provinsi Riau, yang masing-masing terletak di Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, dan Kota Pekanbaru. Dari 12 kabupaten kota di Provinsi Riau, baru 2 kabupaten dan satu kota yang terdapat Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. PT. BPRS Hasanah merupakan BPRS satu-satunya yang ada di ibukota Provinsi Riau, yaitu kota Pekanbaru dan juga merupakan BPRS yang terlebih dahulu beroperasi pada tahun 1995. Kemudian disusul oleh PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah satu tahun setelahnya beroperasi di Kabupaten Kampar pada tahun 1996. Terakhir PT. BPRS Siak Jaya yang baru beroperasi di tahun 2022 setelah pandemi Covid-19. Walaupun jumlah BPR Syariah lebih sedikit dibandingkan BPR Konvensional, bahkan hampir tujuh kali lipatnya. Namun, Aset BPR Syariah terus mengalami kenaikan disetiap BPR Syariah yang ada di Provinsi Riau.

Aset BPR Syariah terus mengalami kenaikan disetiap BPR Syariah yang ada di Provinsi Riau, hal ini bisa dilihat pada tabel 5.

Tabel. 5. Jumlah Aset BPRS di Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (ribuan rupiah)

Tahun	PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)	PT. BPRS Siak Jaya	PT. BPRS Hasanah
2019	39.387.798	-	12.344.606
2020	46.940.245	-	17.681.584
2021	60.009.598	-	25.490.310
2022	64.236.255	19.168.193	50.677.414
2023	70.257.651	25.130.628	70.860.665
2024	76.919.595	25.768.726	77.462.497

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan,2024 (data diolah)

Tabel 5 menunjukkan jumlah aset BPRS di Provinsi Riau dari tahun 2019 sampai 2024. Jumlah aset terbesar dimiliki oleh PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah yang terletak di Kabupaten Kampar dengan total aset Rp. 70.513.152.000 di tahun 2024 bulan september. Kemudian disusul oleh PT. BPRS Hasanah dan PT. BPRS Siak Jaya, hal ini dikarenakan PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah sebagai perusahaan daerah dan juga terlebih dahulu berdiri dibandingkan PT. BPRS Siak Jaya, tentu dari segi aset sudah berkembang dari tahun ke tahun. Kenaikan aset masing-masing BPR Syariah juga signifikan, bahkan saat pandemi Covid-19 melanda. Hal ini terlihat aset PT.BPRS Berkah Dana Fadhilah naik 44,1% dari tahun 2019 sampai 2024. Begitu juga kenaikan aset PT. BPRS Hasanah dari tahun 2019 sampai 2024 mengalamai kenaikan sebesar RP. 56.847.046.000 atau 82,1%. Kemudian aset PT. BPRS Siak Jaya naik 20,5% selama 3 tahun, yaitu dari tahun 2024 sampai 2024. Kewajiban/*Liability* BPR Syariah yang ada di Provinsi Riau juga mengalami tren naik dari tahun 2019 sampai tahun 2024.

Manajemen likuiditas sangat diperlukan agar perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan baik, karena likuiditas juga merupakan salah satu faktor penentu sehatnya perbankan syariah dalam melunasi dana para deposannya yang ingin menarik kembali kredit, salah satunya dinilai dengan menggunakan

rasio FDR *(Financing to Deposit Ratio)* (Muljono,1996). Nilai *Financing to Deposit Ratio (FDR)* BPRS di Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 8. Nilai *Financing to Deposit Ratio (FDR)* BPRS di Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (%)

Tahun	PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)	PT. BPRS Siak Jaya	PT. BPRS Hasanah
2019	62,82	-	96,86
2020	61,90	-	84,90
2021	65,64	-	76,84
2022	72,33	120,00	128,24
2023	69,12	105,00	155.28
2024	70,45	120,00	153.94

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan,2024 (data diolah)

Dari Tabel 8 dapat dilihat nilai *Financing to Deposit Ratio (FDR)* BPRS di Provinsi Riau. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/12/PBI/2019, tingkat *Financing to Deposit Ratio (FDR)* yang menunjukkan likuiditas yang sehat bagi bank adalah antara 84% hingga 94%. Apabila *FDR* bank syariah berada di bawah 84% atau melebihi 94%, hal ini menunjukkan bahwa bank tersebut tidak menjalankan fungsi intermediasi secara optimal (Angraeni, Widodo dan Lestari, 2022). Nilai *FDR* PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah dari tahun 2019 sampai 2024 berada di rentang 61,90% - 72,33%, dengan nilai *FDR* yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 nilai *FDR* menurun dari tahun sebelumnya, kemudian meningkat hingga tahun 2022, namun turun kembali ditahun 2023 dan naik menjadi 70,45% di tahun 2024, tetapi tidak lebih tinggi di tahun 2022 yaitu 72,33%. Nilai *FDR* PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah menunjukkan bahwa bank tersebut belum menjalankan fungsi intermediasi secara optimal dan belum menunjukkan likuiditas yang sehat. Kemudian, nilai *FDR* PT. BPRS Siak Jaya berada di rentang 105% - 120% dari tahun 2022 sampai 2024. Pada tahun 2022 dan 2024 nilai *FDR* nya sama yaitu 120%, di tahun 2023 mendekati rentang ideal yaitu 105%. Nilai *FDR* PT. BPRS Siak Jaya menunjukkanbahwa bank tersebut belum menjalankan fungsi intermediasi secara optimal. Nilai *FDR* PT. BPRS Hasanah berada direntang 76,48% – 155,28%, nilai ini menunjukkan dua kondisi dimana PT. BPRS Hasanah pernah berada di rentang nilai *FDR* yang ideal dan tidak ideal. Hal ini menunjukkan bahwa bank tersebut pernah berada pada posisi dimana likuiditas yang sehat dan menjalankan fungsi intermediasi secara optimal, dan sebaliknya. Namun posisi idealnya pada tahun 2020 yaitu sebesar 84,90% dan di tahun 2019 hampir mendekati posisi ideal, sedangkan pada tahun 2021, 2022, dan 2023 lebih dari 100%.

Standarisasi yang ditetapkan OJK untuk rasio *FDR* adalah 85% - 110% (Fitriyah,2016). *FDR* dihitung berdasarkan rasio antara total pembiayaan yang disalurkan oleh bank dengan jumlah dana yang berhasil dikumpulkan dari nasabah. Rasio ini mencerminkan metode atau kapasitas bank dalam mengelola likuiditasnya (Savitri, 2011). Semakin besar nilai *FDR,* maka potensi keuntungan bank pun meningkat, selama penyaluran dana dilakukan secara efisien. Peningkatan laba tersebut akan berdampak positif terhadap kinerja bank secara keseluruhan. Jika suatu bank memiliki FDR sebesar 85% (di bawah batas ideal), berarti hanya 85% dari total dana yang berhasil dihimpun telah disalurkan. Sebaliknya, apabila *FDR* melebihi 110%, hal ini menunjukkan bahwa bank telah melampaui batas ideal yang telah ditentukan(Fitriyah,2016). Apabila rasio FDR bank berada dalam kisaran ideal, maka keuntungan yang diperoleh bank akan mengalami peningkatan(Sangia,2025). Namun, jika rasio *FDR* rendah, hal ini mengindikasikan bahwa bank kurang

efektif dalam menyalurkan pembiayaannya, yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat likuiditas. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Slamet Riyadi (2014) dan Dhian Dayinta (2012) yang menyimpulkan bahwa *FDR* memiliki pengaruh positif terhadap *Return on Assets (ROA)* pada Bank Syariah. Dengan demikian hanya dua BPRS yang masuk dalam standar rentang nilai *FDR*, yaitu PT. BPRS Siak Jaya ditahun 2023 sebesar 105% dan PT. BPRS Hasanah di tahun 2019 dan 2020 yaitu masing-masing sebesar 96,86% dan 84,9%. Namun dari ketiga BPRS di Provinsi Riau pada tahun 2024 yang paling mendekati rentang standar nilai *FDR* adalah PT. BPRS Siak Jaya sebesar 120%, kemudian disusul PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah sebesar 70,45%.

Selain *FDR* sebagai salah satu rasio yang mencerminkan kapasitas bank dalam mengelola likuiditasnya dan penilaian kesehatan suatu bank. *Cash Ratio* juga dapat digunakan untuk penilaian likuiditas suatu bank dengan mengukur besarnya uang kas yang tersedia untuk melunasi kewajiban jangka pendek yang ditunjukkan dari tersedianya dan kas atau setara kas. Jika hasil rasio menunjukan 1:1 atau 100% atau semakin besar perbandingan kas atau setara kas dengan utang akan semakin baik. Nilai *Cash Ratio* BPRS di Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 9. Nilai *Cash Ratio* BPRS di Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (%)

Tahun	PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)	PT. BPRS Siak Jaya	PT. BPRS Hasanah
2019	31,62	-	16,13
2020	29,21	-	45,67
2021	27,77	-	50,23
2022	18,53	36,00	39,65
2023	15,22	24,76	21,36
2024	12,39	12,19	17,29

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan,2024 (data diolah)

Dari tabel 9, dapat dilihat bahwa nilai *Cash Ratio* tertinggi di tahun 2024 adalah PT. BPRS Hasanah yaitu sebesar 17,29%, disusul dengan posisi kedua yaitu PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah sebesar 12,39% dan terakhir PT. BPRS Siak Jaya sebesar 12,19%. Hal ini menunjukkan ketersediaan kas untuk melunasi utang jangka pendek pada BPRS yang ada di Riau yang terbesar adalah PT. BPRS Hasanah, yaitu 17,29% pada tahun 2024, namun hal ini masih sangat rendah. Cash Ratio sebesar 17,29% mengindikasikan bahwa perusahaan hanya memiliki kas dan setara kas sebesar 17,29% dari total kewajiban lancarnya. Artinya, dari seluruh utang jangka pendek yang dimiliki, hanya sekitar 17,29% yang dapat langsung dilunasi menggunakan kas atau dana yang sangat likuid tanpa harus menjual aset lainnya. Dengan kata lain, untuk setiap Rp100 utang lancar, perusahaan hanya memiliki Rp17,29 dalam bentuk kas. Rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas yang cukup rendah, sehingga perusahaan mungkin perlu mengandalkan aset lancar lainnya (seperti piutang atau persediaan) untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Nilai *Cash Ratio* PT. BPRS Hasanah berfluktuatif dari tahun 2019 sampai tahun 2024, nilai rasio tertinggi pada tahun 2021 sebesar 50,23%, namun rasio ini masih rendah, karena hanya setengah kas yang tersedia untuk membayar 1 utang.

PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah memiliki nilai *Cash Ratio* tertinggi pada tahun 2019 yaitu sebesar 31,62% dibandingkan tahun setelahnya sampai tahun 2024. Hal ini menunjukkan setelah pandemi Covid-19 nilai *Cash Ratio* PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah terus turun, hingga di tahun 2024 sebesar 12,39%. *Cash Ratio* sebesar 12,39% berarti bahwa bank hanya memiliki kas dan setara kas sebesar 12,39% dari total kewajiban lancarnya. Dengan kata lain, untuk setiap Rp100 utang jangka pendek

yang harus segera dibayar, perusahaan hanya memiliki sekitar Rp12,39 dalam bentuk kas atau aset yang sangat likuid. Idealnya, semakin tinggi cash ratio, semakin baik kemampuan perusahaan dalam menghadapi kewajiban mendesak. Namun, terlalu tinggi juga bisa berarti perusahaan tidak memaksimalkan penggunaan dananya.

Nilai *Cash Ratio* pada PT. BPRS Siak Jaya juga mengalami tren turun dan masih tergolong rendah, hal ini dari tabel diatas dari tahun 2022 nilai *Cash Ratio* sebesar 36%, tahun 2023 sebesar 24,76% dan turun kembali tahun 2024 menjadi 12,19%. *Cash Ratio* sebesar 12,19% pada PT. BPRS Siak Jaya mengindikasikan bahwa bank hanya memiliki kas dan setara kas sebesar 12,19% dari total kewajiban lancarnya. Artinya, dari setiap Rp100 kewajiban jangka pendek (misalnya dana pihak ketiga jangka pendek, kewajiban kepada nasabah, atau instrumen keuangan jangka pendek lainnya), bank hanya memiliki sekitar Rp12,19 dalam bentuk kas atau aset yang paling likuid untuk segera melunasinya. Hal ini menuntut pengelolaan likuiditas yang sangat hati-hati, terutama dengan tetap menjaga prinsip syariah.

SIMPULAN

Terdapat dua BPRS yang masuk dalam standar rentang nilai *FDR*, yaitu PT. BPRS Siak Jaya ditahun 2023 sebesar 105% dan PT. BPRS Hasanah di tahun 2019 dan 2020 yaitu masing-masing sebesar 96,86% dan 84,9%. Namun dari ketiga BPRS di Provinsi Riau pada tahun 2024 yang paling mendekati rentang standar nilai *FDR* adalah PT. BPRS Siak Jaya sebesar 120%, kemudian disusul PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah sebesar 70,45%. Nilai *cash* ratio BPRS di Provinsi Riau juga menunjukkan tingkat likuiditas yang cukup rendah, diantara BPRS yang memiliki ratio tertinggi adalah PT. BPRS Hasanah, namun belum juga ideal, karena hanya setengah kas yang tersedia untuk membayar 1 utang atau 50,23%. Sehingga perusahaan mungkin perlu mengandalkan aset lancar lainnya (seperti piutang atau persediaan) untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Hal ini menunjukkan BPRS di Provinsi Riau masih belum optimal dalam manajemen likuiditasnya. Idealnya, semakin tinggi cash ratio, semakin baik kemampuan perusahaan dalam menghadapi kewajiban mendesak. Namun, terlalu tinggi juga bisa berarti perusahaan tidak memaksimalkan penggunaan dananya. Hal ini menuntut pengelolaan likuiditas yang sangat hati-hati, terutama dengan tetap menjaga prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Angraeni, B. D., Widodo, S., & Lestari, S. S. (2022). Analisis Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR), Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan Debt to Equity Ratio (DER) Terhadap Return on Equity (ROE) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2. *Masyarif Al-Syariah*, *7*(1), 128–155.

Fitriyah, R. (2016). Pengaruh FDR, NIM, NPF dan BOPO terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah Devisa Di Indonesia (Periode Maret 2011- Desember 2015). *Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.*

Indonesia, B. (2025). *Laporan Perekonomian Provinsi Riau Februari 2024*. https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Riau-Februari-2025.aspx

Mahdatika, A., & Al-Mashrafiyah, D. H. (2021). Manajemen Likuiditas, Manajemen GAP, dan Manajemen Valuta Asing Pada Assets and Liability Management (ALMA) Terhadap Net Profit Margin (NPM) Pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2017-2019. *Oktober*, *5*(2), 1–14.

Muljono. (1996). *Bank Budgeting Profit Planning & Control*. BPFE YOGYAKARTA.

OJK. (n.d.). *PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 3 /POJK.03/2016* . 2016.

Retrieved June 9, 2025, from https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-ojk/Documents/Pages/pojk-tentang-bank-pembiayaan-rakyat-syariah/SALINAN-POJK 3 BPRS .pdf

OJK. (2024). *Statistik Perbankan Syariah*. Otoritas Jasa Keuangan. https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2023/STATISTIK PERBANKAN SYARIAH - DESEMBER 2023.pdf

OJK. (2025). *Statistik Perbankan Syariah*. https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/laporan-keuangan-perbankan/Default.aspx

Sangia, A. (2012). *ANALISIS PENGARUH CAR, FDR, BOPO, DAN NCOM TERHADAP PROFITABILITAS (ROA) BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA (Studi Pada Bank Umum Syariah Periode 2008-2011) - Digital Library : Fakultas Ekonomika dan Bisnis*. Skripsi. https://repofeb.undip.ac.id/5581/

Sulistyowati, S. (2015). MANAJEMEN LIKUIDITAS BANK SYARI'AH (Upaya Peningkatan Good Corporate Governance). *UNIVERSUM*, *9*. https://doi.org/10.30762/universum.v9i1.71